



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI**  
**KE PROVINSI SULAWESI BARAT**

**RESES MASA PERSIDANGAN V**  
**TAHUN SIDANG 2016-2017**

**KOMISI VII**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA**  
**2017**

## **BAGIAN I**

### **A. LATAR BELAKANG**

Provinsi Sulawesi Barat dengan Mamuju sebagai ibu kotanya merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 ini merupakan daerah yang sedang berkembang. Kondisi ekonomi Sulawesi Barat dalam lima tahun terakhir tumbuh mengesankan mencapai rata-rata 8,91 persen, berada di atas rata-rata nasional 5,9 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat turut didukung oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah di wilayah ini. .

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, sampai perkebunan serta sektor pertambangan dan energi. Di sektor pertambangan dan energi, potensi sumberdaya alamnya meliputi batubara, bijih besi, tembaga, pasir kuarsa, zeolit, kaolin, dan lain-lain yang tersebar di 8 Kabupaten, yaitu, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara, dan kabupate Polewali Mandar. Adapun potensi minyak dan gas bumi terdapat di Blok Bala-Balakang (Tanjung Aru), Sebuku, Malunda, Surumana, Kuma, Budong-Budong, dan Karama serta Blok Mandar. Namun demikian, dari sekian potensi migas tersebut, baru Blok Sebuku yang sudah tahap eksploitasi dan produksi. Sementara blok yang lain, ada yang sudah ditinggalkan kontraktornya karena tidak menemukan potensi minyak dan gas, dan ada yang masih dalam tahap eksplorasi, yakni mencari cadangan hidrokarbon/migas.

Selain itu, di sektor energi, potensi sumber daya energinya meliputi tenaga uap, tenaga surya, serta tenaga air. Kondisi geografis Sulawesi Barat dikelilingi oleh pegunungan sehingga banyak terbentuk DAS berpotensi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air baik berskala besar (PLTA) maupun berskala kecil (PLTM). Namun demikian, terdapat beberapa daerah di Sulawesi Barat yang masih kekurangan listrik, yaitu di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju Utara. Ketersediaan listrik di Kabupaten Mamuju Tengah

dan Mamuju Utara belum maksimal sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk memasok kekurangan kebutuhan energi tersebut.

Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah ini, perlu mendapat respon pemerintah daerah dengan berbenah diri menghadapi tantangan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya di sektor pertambangan dan energi untuk dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah dan di arahkan pada tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat daerah dengan tetap mengedepankan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak positif, ataupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya alamnya. Selain itu dengan pembangunan di berbagai sektor, juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Adapun dampak negatifnya adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI di bidang energi dan sumber daya alam, lingkungan hidup serta kegiatan riset dan teknologi, memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA**

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data, informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi di Provinsi Sulawesi Barat
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Barat khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4. Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Provinsi Sulawesi Barat
5. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi fosil, distribusi dan harga BBM dan Gas serta masalah ketenagalistrikan.

### **D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN**

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 9 Agustus 2017 dengan tujuan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur, DPRD, Dewan Riset Daerah, Dinas Pertambangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Utama PT PLN (Persero), Manajemen PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VII, PT Aneka Tambang, Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK, Kementerian Ristek & Dikti, dan instansi terkait lainnya.
2. Pertemuan dengan SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina (MOR VII) Perusahaan KKKS yakni, PT Kris Energy, PT Mubadala Petroleum dan instansi terkait lainnya.
3. Pertemuan dengan Direksi dan Manajemen PT PLN (Persero) wilayah Sulselrabar (Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat), dan serta instansi terkait lainnya.

#### **E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN**

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

#### **F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

**G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN**

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.

## **BAGIAN II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA**

#### **1. Pertemuan dengan Direksi dan Manajemen PT PLN (Persero) wilayah Sulselrabar (Sulawesi Selatan, Tenggara, Barat), dan instansi terkait lainnya, dilanjutkan dengan peninjauan ke PLTU Mamuju.**

Hasil pertemuan dengan Direksi dan Manajemen PT PLN (Persero) wilayah Sulselrabar sebagai berikut:

- a. Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam sistem kelistrikan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar). Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan rasio elektrifikasi tergolong rendah di Indonesia. Tahun 2016, menurut data PLN, rasio elektrifikasi Sulawesi Barat sekitar 85,73% dan rasio desa berlistrik 68,6%.
- b. Infrastruktur kelistrikan di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari:
  - 1) Pembangkit dan Gardu Induk: PLTD Pasang Kayu (5.520 KW), PLTMH Kalukku (2 x 700 KW) PLTD Topoyo (5.000 KW), PLTMH Budong-Budong (2 x 1.000 KW) PLTMH Balla (2 x 350 KW) GI Polewali (50 MW).
  - 2) Transmisi: Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 2.099 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 1.733 kms dan Gardu: 119 kVA; 2.093 bh dengan total pengguna listrik sebanyak 207.396 pelanggan.
- c. Total Daya Mampu (DM) seluruh sistem di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 121,2 MW sedangkan beban puncak (BP) tertinggi adalah sebesar 63,2 MW. Sehingga terjadi surplus daya sebesar 58 MW. Meski mengalami surplus, tetapi rasio elektrifikasi masih rendah, karena banyaknya daerah terpencil dan wilayah kepulauan, sehingga menyulitkan dalam pengembangan jaringan listrik (Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah) dan gardu induk serta pembangunan infrastruktur listrik tersebut dirasakan lamban, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan

listrik rumah tangganya baik di perkotaan maupun di perdesaan. Namun demikian, daerah-daerah yang sudah terliri listrik tidak mengalami pemadaman bergilir.

- d. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta PLN mensosialisasikan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan listrik 900 VA dengan cara mengirimkan surat kepada masing-masing pelanggan, untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat.
- e. Rencana pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Sulawesi Barat 2017 sebagai berikut:
  - 1) PLTU Mamuju (2 x 25 MW) (Progres: 94,14%)
  - 2) PLTM Bonehau (2 X 0.2 MW) (Progres: 100%)
- f. Progres pembangunan PLTU Mamuju saat ini sudah mencapai 94,14% dengan pekerjaan *On Progres*: penyelesaian konstruksi boiler, pekerjaan mekanikal turbin dan generator, pekerjaan elektrikal penyambungan kabel power dan gardu, dan pekerjaan tower transmisi.
- g. Dari 646 desa di Provinsi Sulawesi Barat diperkirakan masih ada 151 desa yang belum dialiri listrik, karena itu, program LISDES (Listrik Desa) perlu terus dipercepat supaya segera dinikmati oleh masyarakat. Rencana PT PLN tahun 2017 akan melistriki 31 desa dan tahun 2018 akan melistriki 120 desa.
- h. Potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Barat cukup banyak dan beragam perlu dilakukan inventarisasi dan pendataan dengan lebih detail untuk menjadi bahan perencanaan dalam pengembangannya, serta pengalokasian anggaran pembangunan termasuk sebagai upaya untuk menarik bagi investor atau mitra pembangunan agar terlibat aktif dalam peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Barat.

**2. Pertemuan dengan SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina (MOR VII) seluruh Perusahaan KKKS di Provinsi Sulawesi Barat dan instansi terkait lainnya.**



Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran SKK Migas, BPH Migas, PT Pertamina (MOR VII) seluruh Perusahaan KKKS di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam wilayah kerja Pertamina Operation Region (MOR) VII. Infrastruktur yang dimiliki MOR VII terdiri dari 17 TBBM, 7 DPPU dan 2 Depot LPG. Untuk kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, BBM/BBK disuplai dari TBBM Parepare (Sulawesi Selatan) dan TBBM Donggala (Sulawesi Tengah). Sedangkan LPG disuplai dari TBBM Parepare (Sulawesi Selatan) dan TBBM Donggala (Sulawesi Tengah).
- b. Lembaga penyalur BBM di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari: 21 SPBU Reguler, 3 SPBU Kompak, 1 SPNU Mini, 4 SPBUN, 1 Agen BBM Ind. Sedangkan lembaga penyalur LPG terdiri dari: 1 SPPBE PSO, 11 Agen PSO, 4 Agen Non PSO, 725 Sub Penyalur PSO dan 377 Sub Penyalur Non PSO Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM.
- c. Pada tahun 2016 BBM yang disalurkan sebanyak 157 Ribu KL BBM PSO dan 739,742 BBM Non PSO serta LPG yang disalurkan sebanyak 23,6 Ribu MT LPG PSO dan 0,4 Ribu MT LPG Non PSO. Sedangkan penyaluran BBM industri dan marine sebanyak 33,24 Ribu KL dan Aviasu sebanyak 53,095 Ribu KL. Adapun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 49,240 Miliar Rupiah dengan volume sebesar 170 Juta KL.
- d. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam distribusi BBM di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah jarak tempuh sampai dengan 450 KM dengan jalan berliku dan berbukit serta kondisi cuaca yang cukup ekstrem pada periode tertentu rawan longsor .
- e. Upaya penanggulangan masalah distribusi BBM dan LPG dilakukan dengan segera membangun Depot/TBBM dan LPG di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, dan membangun lembaga penyalur atau sub penyalur

baru di daerah-daerah terpencil. Maka diperlukan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah yaitu Investasi pembangunan TBBM/lembaga penyalur dengan menggunakan APBN/APBD. Serta perlu ada perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan dermaga di daerah terpencil untuk mengefisienkan ongkos angkut penyaluran.

- f. Mengingat lokasi jarak tempuh yang cukup jauh dan hambatan alam yang tidak dapat diduga, maka Pertamina harus menyiapkan cadangan BBM yang cukup dalam jangka waktu tertentu agar apabila terjadi kendala dan hambatan karena faktor alam, ketersediaan BBM di Provinsi Sulawesi Barat masih bisa diatasi.
- g. Provinsi Sulawesi Barat terdapat KKKS yang beroperasi, baik *off shore* maupun *on shore* dan 1 KKKS, yakni Pearl Oilil Sebuku/Mubadala Petroleum (WK Sebuku) dalam Tahap Operasi Produksi sisanya 2 KKKS dalam tahap eksplorasi, yakni Pearl Oilil Sebuku/Mubadala Petroleum (WK West Sebuku), Stockbridge (WK Budong-Budong) Krisenergy Bv. (WK Bala-Balakang).
- h. Upaya dan tantangan yang dihadapi dalam proses peningkatan produksi WK Sebuku adalah mendorong PLN agar mempercepat operasionalnya MPP Bontang Baru dan pembangunan pipa ke Tanjung Batu sehingga dapat menyerap gas ruby secepatnya.
- i. Masalah *Participating Interest* (PI) 10% WK Sebuku, sesuai arahan Wakil Presiden (notulen rapat tanggal 31 Maret 2015), hak PI 10% WK Sebuku dibagi 2 (dua), masing-masing sebesar 50% kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat dan SKK Migas telah mengirim surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat tanggal 20 Juni 2017 agar menyiapkan dan menunjuk BUMD dan/atau PPD yang akan menerima dan mengelola PI 10% tersebut sesuai Permen ESDM 37/2016.

**3. Pertemuan dengan Gubernur, DPRD, Dewan Riset Daerah, Dinas Pertambangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Direktur Utama PT PLN (Persero), Manajemen PT Pertamina (Persero) Marketing**

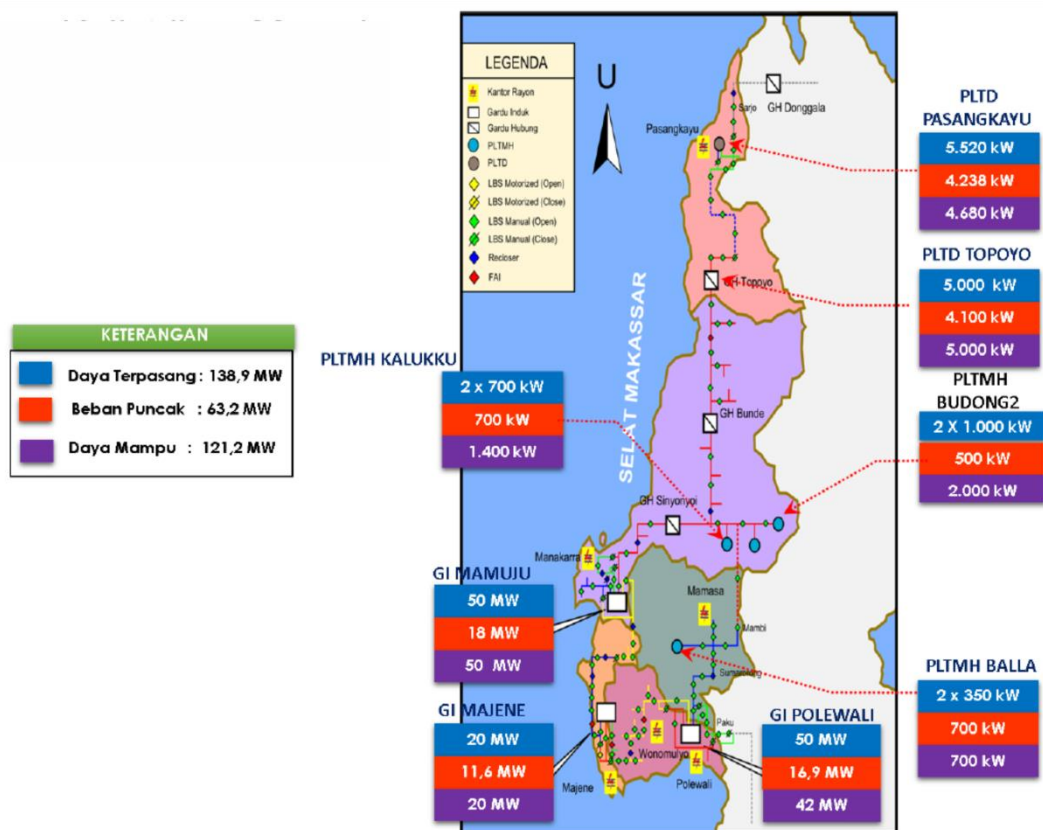
**Operasion Region (MOR) VII, Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK, Kementerian Ristek & Dikti, dan instansi terkait lainnya.**

Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat dan instansi terkait dengan bidang kerja Komisi VII DPR RI membahas berbagai permasalahan terkait dengan sektor energi dan kelistrikan. Pada pertemuan tersebut yang menjadi fokus perhatian utama adalah pembahasan masalah kelistrikan, terkait dengan kekurangan pasokan dan upaya menambah rasio elektrifikasi di masa yang akan datang serta masalah distribusi BBM dan masalah pendapatan daerah dari migas. Hasil-hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam yang dapat dikelola untuk menjadi penggerak utama roda perekonomian. Adapun potensi sumber daya alam seperti :
  - 1) Potensi Bahan galian mineral logam (emas, bijih besi, mangan, galena, dan tembaga), Batubara, Mineral Non Logam (Siolit, Granit, Marmer, Sirkon dan pasir kuarsa) dan Batuan serta Bahan Galian Radioaktif (Uranium dan Thorium).
  - 2) Memiliki 11 (sebelas) alur sungai besar yang berpotensi untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dan potensi Energi Baru Terbarukan yang lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB), Biomassa, dan Panas Bumi.
  - 3) Potensi Minyak dan Gas Bumi khususnya yang berada di perairan laut Selat Makassar, terbukti sebanyak 5 (lima) Wilayah Kerja (WK) Aktif (1 WK tahap Operasi Produksi dan 4 WK tahap eksplorasi), dan 5 (lima) WK proses lelang.
- b. Kondisi kelistrikan Provinsi Sulawesi Barat masih rendah berkisar 66,1% (data PLN) dan Rasio Desa Berlistrik berkisar 75,9%. Total

daya mampu seluruh sistem sebesar 138,9 MW dengan beban puncak 63,2 MW dan daya mampu 121,2 MW. Sampai saat ini masih terdapat 151 Desa dari total 646 Desa di Provinsi Sulawesi Barat meskipun daya yang dimiliki surplus 58 MW. Untuk itu, perlu upaya dan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan kelistrikan, khususnya gardu induk dan jaringan listrik di Provinsi Sulawesi Barat. Rincian rasio elektrifikasi dan daftar jumlah desa yang belum berlistrik masing-masing kabupaten sebagai berikut:

### Kondisi sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Barat



### Kondisi Desa Berlistrik dan Desa Belum Berlistrik

Kabupaten	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik		
	Kec	Kel	Desa	Kec	Kel	Desa
Mamuju	11	12	88	1	-	17
Mamuju Utara	12	4	59	-	-	5
Mamuju Tengah	5	-	54	-	-	8

Polewali Mandar	16	23	144	-	-	12
Majene	8	20	62	-	-	6
Mamasa	17	13	168	5	4	99
<b>TOTAL</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>575</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>147</b>

#### Rasio Elektrifikasi

Kabupaten	Rasio Elektrifikasi	Rasio Desa Berlistrik
Mamuju	72.9 %	83.0 %
Mamuju Tengah	44.0 %	85.2 %
Mamuju Utara	44.0 %	92.1 %
Majene	84.6 %	92.7 %
Polewali Mandar	84.4 %	92.8 %
Mamasa	28.0 %	43.1 %
<b>TOTAL</b>	<b>66.1 %</b>	<b>75.9%</b>

#### Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Barat 2010-2016

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
33.26	36.28	46.62	55.98	57.36	46.37	52.04	55.52	60.41	64.63	68

- c. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Barat, maka diharapkan dukungan semua pihak untuk mendorong pembangunan jaringan ketenagalistrikan baik di wilayah perkotaan, perdesaan dan kepulauan, melalui dana APBN dan mempercepat penyelesaian pembebasan lahan dan pembangunan Jaringan Listrik (JTM dan JTR) oleh PT. PLN di daerah terpencil serta Program Listrik Hemat dan Murah (LHM) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut diharapkan sampai tahun 2019 peningkatan rasio elektrifikasi dapat mencapai mendekati 100%

- d. Provinsi Sulawesi Barat mempunyai sumber dan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah dan cukup beragam, diantaranya yaitu, tenaga air/sungai (PLTA), tenaga mini (PLTM), tenaga mikro hidro (PLTMH), tenaga surya (PLTS), tenaga bayu/angin (PLTB) dan tenaga panas bumi (PLTP). Namun demikian, potensi-potensi tersebut belum dapat dikembangkan dengan maksimal karena berbagai hambatan termasuk kondisi geografis dan anggaran, serta yang utama adalah kebijakan dan dorongan dari pemerintah pusat. Rincian potensi EBT sebagai berikut:

No	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas (MW)	
1	Potensi tenaga air untuk PLTA	1.482 MW	
2	Potensi tenaga air untuk PLTM	104,3 MW	
3	Potensi tenaga air untuk PLTMH	0,4 MW	Sudah 227 unit yang beroperasi dan melistriki 24.599 KK
4	Potensi tenaga surya untuk PLTS	5,86 Kw/M <sup>2</sup> / Hari	Rata-rata penyinaran matahari kawasan Timur
5	Potensi tenaga bayu untuk PLTB	0,5-1 MW/3-8 KM/Jam	
6	Potensi panas bumi untuk PLTP	531 MWe	

- e. Potensi energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Barat yang cukup banyak dan beragam perlu dilakukan inventarisasi dan pendataan dengan lebih detail untuk menjadi bahan perencanaan dalam pengembangan, serta pengalokasian anggaran pembangunan dari APBN, APBD, dan DAK, termasuk sebagai upaya untuk menarik bagi investor atau mitra pembangunan agar terlibat aktif dalam peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Barat.
- f. Terkait dengan program listrik gratis (subsidi), Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM dalam Rapat Kerja telah menetapkan anggaran

subsidi listrik pada tahun 2018 sebesar 51 triliun, dengan catatan, kalau ada penghematan, maka sisanya digunakan untuk subsidi pemasangan listrik bagi warga tidak mampu.

- g. Provinsi Sulawesi Barat telah mengusulkan Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan kepada Kementerian ESDM RI melalui dana DAK (kordinasi Bappenas) dan APBN berupa pembangunan PLTS dan PLTMH terpusat sebanyak 18 unit di 18 desa dengan target 14.000 KK yang akan terlayani listrik dengan total kapasitas 414 KW dan anggaran 72.640.600.
  - a. Adanya program-program pembangunan pembangkit listrik EBT oleh kementerian/lembaga dalam skala kecil banyak dibangun oleh masyarakat lain yang dalam pelaksanaannya berjalan sendiri-sendiri tidak terkoordinasi oleh Ditjen EBTKE, maka diperlukan standarisasi perencanaan, penentuan lokasi dan teknis pembangunan oleh pemerintah pusat dengan yang dapat dikoordinasikan oleh Bappenas.
  - b. Provinsi Sulawesi Barat memiliki 5 Blok Migas Aktif yang dikelola oleh KKKS Nasional dan International, baik *off shore* maupun *on shore* dan 1 WK dalam Tahap Operasi Produksi sisanya 4 WK dalam tahap eksplorasi dan terdapat WK yang menggunakan penamaan yang tidak sesuai dengan dimana WK tersebut berada (Provinsi Sulawesi Barat), sehingga berpotensi menimbulkan polemik dengan Provinsi tetangga, seperti WK Sebuku, WK West Sebuku, WK East Sepinggian dan WK South East Ganal 1.
  - c. Pemerintah, melalui kementerian-kementerian terkait diharapkan dapat menyesuaikan nama Wilayah Kerja sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Sulawesi Barat seperti WK East Sepinggian diusulkan menjadi Manakarra Mamuju 1 dan WK South East Ganal 1 menjadi WK Suremana 2 karena Wilayah Kerja tersebut berada dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat

No	KKKS	Wilayah Kerja	Kab	Luas WK Km <sup>2</sup>	Kegiatan
1	Mubadala Petroleum	Sebuku	Majene	2,344.9	Produksi Okt 2013 <i>Participating Interest 10% Kalsel &amp; Sulbar</i>
2	Mubadala Petroleum	West Sebuku	Majene	4,933	PSC Kontrak tahun 2012 Study Geology
3	Krisenergy Bv.	Bala-Balakang	Mamuju	4.190,96	Akuisisi & Processing Seismik 3D 2014
4	Eni Indonesia. Ltd	East Sepinggian	Mateng Matra		Usulan menjadi WK <i>Manakarra Mamuju 1</i>
5	Niko Resources Ltd.	South East Ganal 1	Matra Mateng		

- g. Beberapa WK aktif seperti East Sepinggian dan South East Ganal 1 tidak pernah melakukan koordinasi terkait perkembangan kegiatan usaha hulu Migas kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, kementerian ESDM diharapkan dapat menugaskan kepada KKKS yang beroperasi di WK East Sepinggian dan WK South East Ganal 1, secara berkala memberikan laporan perkembangan kegiatan Usaha Hulu Migas kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- h. Belum ditetapkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari WK Sebuku sesuai hasil pertemuan/notulen rapat Wakil Presiden RI tentang Wilayah Produksi Migas Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 tempat Kantor Wakil Presiden, yang ditindaklanjuti dengan Surat Bersama Gubernur Sulawesi Barat dan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 007.3/2010/SET & Nomor: 120/00971/PEM tanggal 29 Juli 2015 tentang Permohonan Mendapatkan Hak *Participating Interest* (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH)



Pengelolaan Blok Sebuku, untuk itu pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti penetapan PI dan DBH Migas tersebut.

- d. SKK Migas telah mengirim surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat tanggal 20 Juni 2017 agar menyiapkan dan menunjuk BUMD dan/atau PPD yang akan menerima dan mengelola PI 10% tersebut sesuai Permen ESDM 37/2016.
- i. Terdapat masalah penyediaan dan distribusi BBM, di beberapa lokasi di Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat masalah dan hambatan dalam penyaluran BBM karena terbatasnya jumlah lembaga penyalur BBM di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan lambatnya penyediaan infrastruktur lembaga penyalur (Depot/TBBM, SPBU, APMS, Sub Penyalur dan SPDN), yang mengakibatkan seringkali masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan BBM, seperti di wilayah terpencil dan daerah pesisir/kepulauan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pemetaan pembangunan infrastuktur lembaga penyalur BBM untuk diusulkan kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas guna memprioritaskan penyediaan Lembaga Penyalur di daerah terpencil dan wilayah pesisir pantai/kepulauan, untuk memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat.
- j. Pemeritah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan lahan yang diperlukan (5-10 hektar) dan meminta pembangunan depot/jobber BBM di Provinsi Sulawesi Barat mendapat dukungan penuh dari Kementerian ESDM, BPH Migas dan PT. Pertamina, supaya dapat segera direalisasikan guna memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, sehingga tidak bergantung kepada Provinsi tetangga.
- k. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta pemeritah Provinsi Sulawesi Barat bersurat kepada Kementerian ESDM, kalau perlu kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk meminta percepatan proses pembangunan depot BBM di provinsi Sulawesi Barat, karena pemerintah Presiden Joko Widodo sangat peduli dengan program BBM 1 (satu) harga. Dan PT Pertamina sebagai pelaksana pembangunan diharapkan membuka tender dengan melibatkan

pemerintah daerah, serta pembangunan depot BBM desain infrastrukturnya harus berorientasi 50 tahun kedepan.

- i. Menurut PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2012 sampai 2016 sudah ada 2 (dua) *memorandum of understanding* (MoU) antara PT Pertamina dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait pengembangan infrastruktur penyaluran BBM yang rencananya akan dilaksanakan oleh perusahaan daerah (Perusda). Namun demikian, hingga berakhirnya masa MoU tersebut tidak ada tindaklanjut dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- m. PT Pertamina saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk memastikan bentuk lembaga penyalur BBM yang akan dibangun di Provinsi Sulawesi Barat; apakah dalam bentuk depot atau jobber.
- n. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan dukungan dalam pengembangan distribusi BBM dengan memberikan kemudahan perizinan lembaga penyalur/pengangkutan BBM, Investasi pembangunan depot/lembaga penyalur dengan menggunakan APBN/APBD, perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan dermaga di daerah terpencil untuk mengefisienkan ongkos angkut penyaluran; Bersama sama dengan pihak terkait, turut melakukan pengawasan dalam distribusi dan penyaluran BBM PSO dan Non PSO; dan Memfasilitasi berdirinya sub penyalur di daerah terpencil.
- o. Menurut data BPH Migas, di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 5 (lima) badan usaha yang menyalurkan BBM PSO dan non PSO untuk industri dan marine dengan total konsumsi pertahun kisaran 200 juta liter BBM.
- p. Menurut Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Barat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari badan usaha penyalur BBM untuk industri sebesar 5% (BBM PSO) dan 7.5% (BBM non PSO) akan tetapi, prosentasi tersebut bukanlah angka final, karena menghitung disparitas harga BBM di berbagai wilayah. Dari asumsi prosentasi PBBKB tersebut seharusnya pemerintah daerah memperoleh pendapatan sebesar Rp. 70 Miliar. Namun demikian,

pendapatan yang masuk dalam data Dispenda Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar Rp. 30 Miliar. Terkait masalah ini, perlu upaya dan terobosan dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk memaksimalkan pendapatan dari PBBKB tersebut.

### **BAGIAN III**

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat yang telah dilakukan ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Barat secara umum masih sangat rendah meskipun daya listrik mengalami surplus. Untuk itu, perlu upaya maksimal dan terobosan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar dalam APBN.
2. Provinsi Sulawesi Barat mempunyai sumber dan potensi energi baru dan energi terbarukan yang cukup beragam yang perlu dikembangkan lebih maksimal. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Listrik Kementerian ESDM RI untuk mendorong program percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
3. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Menteri ESDM RI, Menteri Ristek dan Dikti, Menteri Desa, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian terkait untuk pembahasan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan di Provinsi Sulawesi Barat dan secara umum nasional.
4. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM RI, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas untuk pembahasan distribusi BBM di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terbatas dan lokasi yang sulit transportasinya.
5. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan RDP dengan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM RI, SKK Migas dan Direktur PT PLN untuk pembahasan peningkatan produksi KKKS dan pasokan Gas untuk PLN.

## **PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, Agustus 2017

**Pimpinan Tim Kunjungan Kerja**

**Komisi VII DPR RI**

**H. Gus Irawan Pasaribu, SE,Ak,MM,CA**

Lampiran:

<b>DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI BARAT RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2016-2017 TANGGAL 6 s/d 9 AGUSTUS 2017</b>				
<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGG.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE,Ak,MM,CA	A-327	F.P.GERINDRA	KETUA TIM
2.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS	A-134	F.PDI-P	ANGGOTA
3.	ANDI RIDWAN WITTIRI	A-226	F.PDI-P	ANGGOTA
4.	TONY WARDOYO	A-231	F.PDI-P	ANGGOTA
5.	Dr. Ir. H. FADEL MUHAMMAD	A-317	F.PG	ANGGOTA
6.	H. DITO GANINDUTO, M.BA	A-278	F.PG	ANGGOTA
7.	Ir. HARRY POERNOMO	A-358	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
8.	ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO	A-342	F.P.GERINDRA	ANGGOTA
9.	H. MAT NASIR, S.SOS	A-438	F.P.DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	PRIMUS YUSTISIO, SE	A-473	F.PAN	ANGGOTA
11.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	A-115	F.PKS	ANGGOTA
12.	H. AGUS SULISTYONO, ST, MT	A-61	F.PKB	ANGGOTA
13.	H. JOKO PURWANTO	A-515	F.PPP	ANGGOTA
14.	Dr. KURTUBI, SE, M.Sp, M.Sc	26	F.NASDEM	ANGGOTA
15.	MUKHTAR TOMPO, S.Psi	A-560	F.HANURA	ANGGOTA